BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN



2.1. Sejarah Singkat Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Barat.

Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Barat dibentuk pertama kali dengan keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 11 – 68/A-I/Pend/SK tanggal 30 September 1968 dengan nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Propinsi Jawa Barat disingkat dengan nama PUSDIKLAT.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan ini dikukuhkan dengan peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1981 dan SOTK PUSDIKLAT ditetapkan dengan peraturan daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No. 10 Tahun 1981.

Pada tanggal 13 September 1984 diterbitkan Kepala Mendagri nomor 64 tahaun 1964 tentang SOTK DIKLAT Propinsi. Untuk itu Gubernur Jawa Barat mengeluarkan keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 061.1/Kep.86-Huk/1986 tanggal 23 Juni 1986 tentang SOTK Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Dati I Jawa Barat.

Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Dati I Jawa Barat dikukuhkan dengan peraturan daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No. 17 Tahun 1994, sedangkan SOTK ditetapkan dengan peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No. 18 Tahun 1994.

Pada perkembangan terakhir terbentuklah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BANDIKLATDA) Propinsi Jawa Barat dengan peraturan daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah, sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 62 Tahun 2001.

2.2. Nama - Nama Kepala Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Barat.

Sejarah terbentuknya Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 1968 sampai dengan BANDIKLATDA propinsi Jawa Barat Tahun 2000, telah beberapa kali pergantian pemimpin yaitu :

1. Drs. H. Sanudi Purawinata
2. Drs. H.E. Kostaram
3. R. H. Unang sunardjo, SH
4. Drs. H. Ahmad Makih
5. Drs. H. Harun Sastrawiria
6. H. Z. A. Sastra Mihardja, SH
7. Hj. Ijus Rukminiatmadja, SH

2.4. Tugas Pokok Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat No. 62 Tahun 2001, tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Propinsi Jawa Barat adalah merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang

Pendidikan dan Pelatihan Daerah meliputi bidang perencanaan, penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta pengembangan sistem Pendidikan dan pelatihan, melaksanakan kewenangan tertentu sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur.

Adapun fungsi BANDIKLATDA Propinsi Jawa Barat adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian dibidang pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan daerah.
b. Pelaksanaan pelayanan penunjang pemerintah daerah dibidang pendidikan dan pelatihan di propinsi dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota.
c. Penyelenggaraan kesekretariatan badan.

2.4. Visi dan Misi Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Barat.

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat atas dinamika kehidupan aparatur, citra dan peran organisasi serta kepekaan pada lingkungan internal dan ekternal yang sedang terjadi.

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah *"Menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Yang Handal Untuk Menciptakan Aparatur Yang Profesional"*.

Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat :

1. Meningkatkan profesionalisasi pengelolaan kediklatan aparatur.
2. Meningkatkankualitas sumber daya manusia aparatur.
3. Meningkatkan penyelenggaraan kediklatan aparatur.

2.5. Struktur Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan peraturan daerah propinsi jawa barat no.16 tahun 2000, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala BANDIKLATDA.
2. Sekretariat. membawakan :
    a. Sub Bagian Umum.
    b. Sub Bagian Kepegawaian.
    c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bagian Perencanaan, membawakan :
    a. Sub Bidang Perencanaan Kegiatan.
    b. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat.
4. Bidang Penyelenggaraan Diklat, membawakan :
    a. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat struktural.
    b. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis.
5. Bidang Pengembangan Sistem Diklat, membawakan :
    a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Intruksional.

b. Sub Bidang Evaluasi.

Disamping itu ada juga jabatan fungsional widyaiswara sejumlah 43 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan formal.

UNPAS UPT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

2.6. Bidang Pekerjaan Dinas Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai kawah candradimuka yang mendidik, melatih, mencetak dan menghasilkan Sumber Daya Manusia Aparatur di Propinsi Jawa Barat, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh, dan akan meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah.

Adapun sasaran dari pemantapan kinerja pemerintah daerah adalah :

1. Meningkatnya efektivitas dan efesieni dalam menyediakan pelayanan publik.
2. Meningkatnya akuntabilitas pelayanan publik dan pemberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme.
3. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah.
4. Meningkatnya penegakan hukum dan hak azasi manusia.
5. Meningkatnya sinergitas antar tingkat pemerintah.
6. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.7. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Barat.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat mempunyai luas $6.110\,M^2$ sebagai pusat pelaksanaan kegiatan administrasi asrama dan ruangan belajar. Dana pembangunan dibiayai dari APBD propinsi jawa barat dilaksanakan secara bertahap dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung lancarnya proses belajar mengajar pada BANDIKLATDA, fasilitas yang dimiliki terdiri dari :

No.	Nama Ruangan	Jumlah/Luas Bangunan
1	Ruang Perkantoran	Gedung Lama 1 (2 lantai)
2	Asrama	Gedung Lama 2 (3 lantai)
3	Ruang Makan	Gedung Baru lantai 2, 3 dan 4
4	Perpustakaan	Gedung Baru lantai 1
5	Mesjid	Gedung Baru lantai 1
6	Ruang Serbaguna	Gedung Lama 2 lantai 1
7	Koperasi	Gedung Khusus Serbaguna
8	Ruang Windyaiswara	Gedung Lama lantai 1
9	Ruang Fotocopy	Gedung Lama lantai 1
10	Poliklinik	Gedung Lama lantai 1
11	Ruang TU Widyaiswara	Gedung Lama lantai 1
12	Multimedia	Gedung Lama lantai 1
13	Laboratorium Komputer	Gedung Baru lantai 4
14	Laboratorium Bahasa	Gedung Baru lantai 4
15	Sarana Olah Raga	Tenis Meja, Lapang Bola Volly, Dll

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana

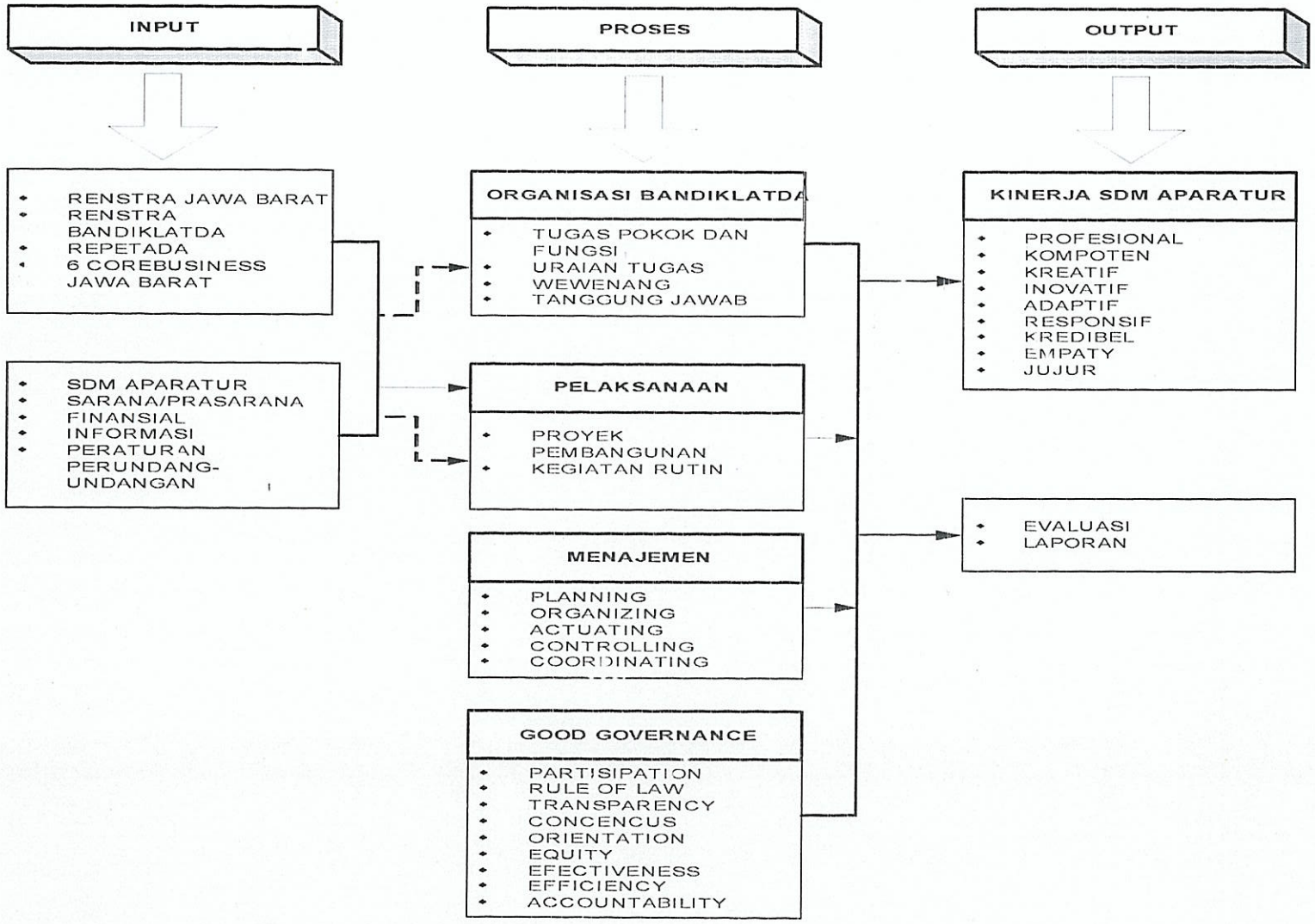
2.8. Dasar Penyusunan Program Kerja Tahun 2004

Program kerja anggaran tahun 2004 penyusunannya didasarkan kepada :

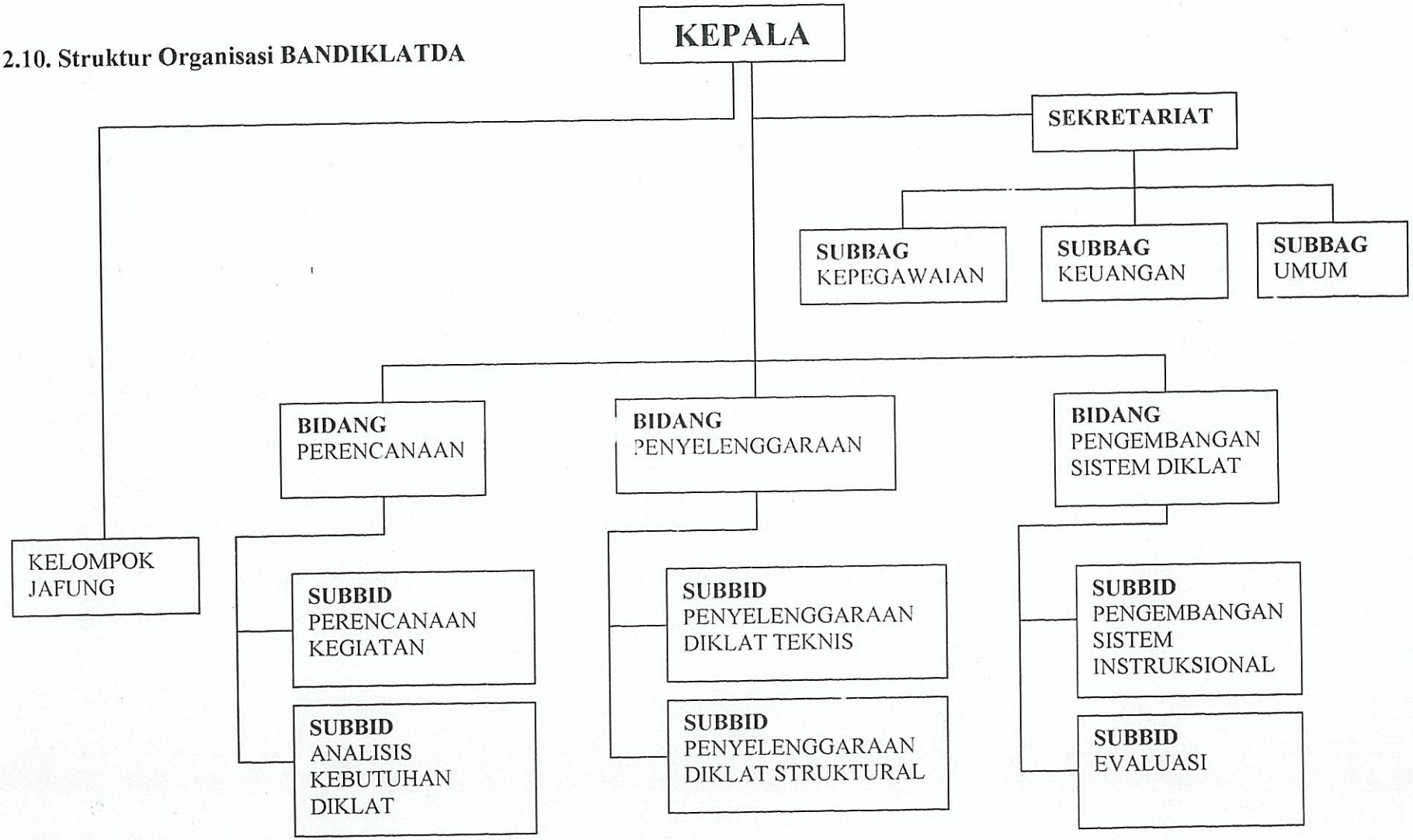
1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
4. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
5. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil.
6. Peraturan daerah propinsi jawa barat nomor 16 tahun 2000 tentang lembaga teknis daerah propinsi jawa barat.
7. Peraturan daerah propinsi jawa barat nomor 1 tahun 2001 tentang rencana strategis propinsi jawa barat tahun 2001-2005.
8. Keputusan gubernur jawa barat nomor 30 tahun 2001 tentang jenjang kerja penyelenggaraan Diklat aparatur propinsi jawa barat.
9. Keputusan gubernur jawa barat nomor 62 tahun 2001 tentang rincian tugas pokok dan fungsi unit badan pendidikan dan pelatihan daerah propinsi jawa barat.

10. Keputusan gubernur jawa barat nomor 903/kep.863-dalprog/2003 tentang standar biaya belanja daerah pemerintah propinsi jawa barat tahun 2004.
11. Keputusan gubernur jawa barat nomor 1 tahun 2003 tentang pedoman hubungan kerja menajemen pendidikan dan pelatihan aparatur.
12. Keputusan gubernur jawa barat nomor 47 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja daerah pemerintah propinsi jawa barat.
13. Keputusan gubernur jawa barat nomor 910/kep.16-dalprog/2004 tentang pengesahan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) propinsi jawa barat tahun anggarna 2004 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat.
14. Keputusan gubernur jawa barat nomor 954/kep.05-keu/2004 tentang penunjukan/penetapan atasan langsung pemegang kas/pemimpin pelaksana kegiatan/pemimpin bagian pelaksana kegiatan/pemegang kas/pembantu pemegang kas (kasir, pembukuan, verivikasi) pada dinas/badan/lembaga/kantor/ satuan kerja propinsi jawa barat tahun anggaran 2004.

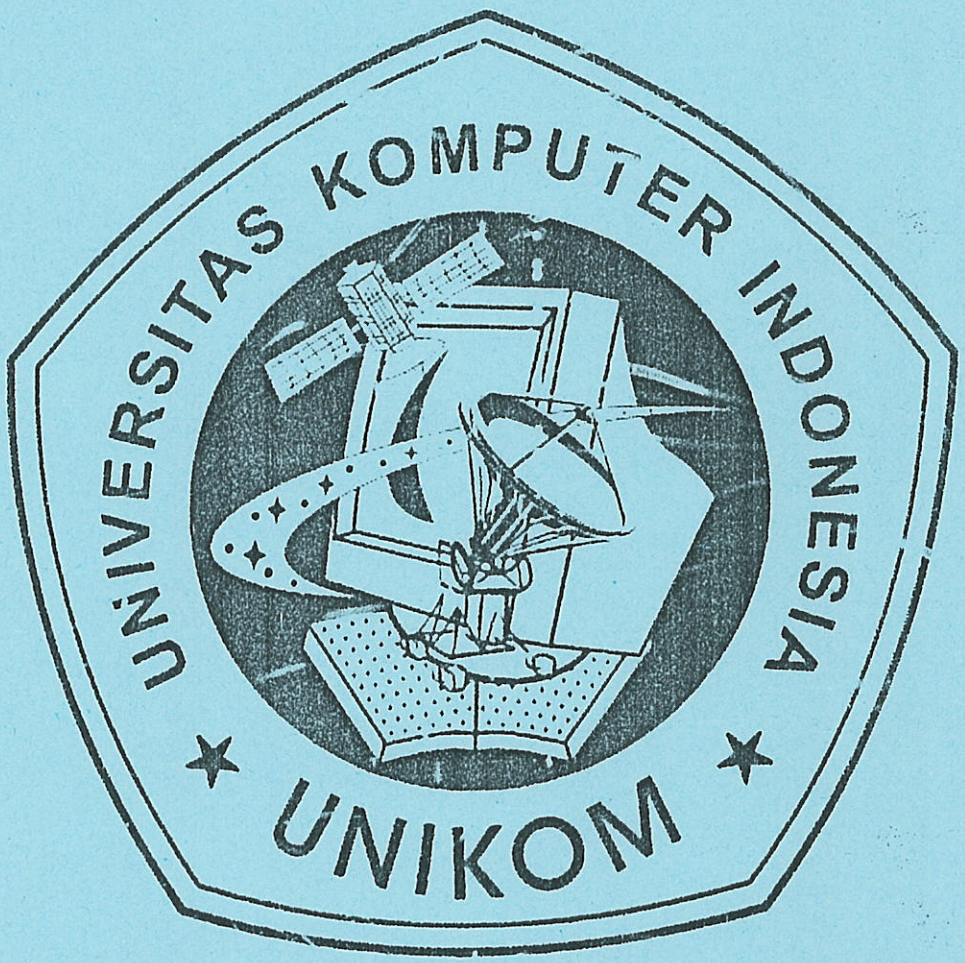
2.9. Kerangka Pikir Program Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Barat.



2.10. Struktur Organisasi BANDIKLATDA



Sumber : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor :16, Tahun 2000


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM